

**PERSPEKTIF ULAMA ACEH TENTANG PEREMPUAN  
DALAM POLITIK**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**ISMATUL RAHMI  
NIM. 180301008**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2025 M / 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismatul rahmi  
NIM : 180301008  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Banda Aceh, 15 Maret 2025  
Yang Menyatakan,



METERAI  
TEMPEL

C21AMX13673383

Ismatul rahmi  
180301008

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh:

**ISMATUL RAHMI**  
NIM. 180301008

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II

Musdawati, S.Ag., M.A

NIP.197509102009012002

Raina Wildan, S.Fil.I., M.A

NIP.201608230219832025

AR - RANIRY

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Aqidah dan Filsafat Islam

Pada hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025 M  
20 Rajab 1446 H

di Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,

  
Musdawati, S.Ag., M.A.  
NIP.197509102009012002

  
Raina Wildan, S.Fil., I, M.A  
NIP.198302232023212027

Anggota I,

Anggota II,

  
Dr. Husna Amin, M. Hum  
NIP. 196312261994022001

  
Drs. Fuadi, M.Hum  
NIP.19650241995031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.  
NIP. 197804222003121001

## ABSTRAK

Nama/NIM : Ismatul Rahmi /180301008  
Judul Skripsi : Perspektif Ulama Aceh Tentang Perempuan  
Dalam Politik  
Tebal Skripsi : 84 Lembar  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Pembimbing I : Musdawati, S.Ag., M.A  
Pembimbing II : Raina Wildan, S.Fil.I., M.A

Di antara kekuatan masyarakat, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi sistem pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan inklusif. Partisipasi perempuan sangat diharapkan sebagai upaya dari terbukanya peluang bagi perempuan dalam bersuara dan terus menunjukkan eksistensinya dan pandangan dari beberapa tokoh agama dirasa berpengaruh besar dalam mempengaruhi opini dari masyarakat terhadap perempuan yang berpolitik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan para ulama Aceh melihat partisipasi perempuan dalam politik Aceh saat ini dan pengaruh mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di Aceh semakin terlihat dan terbuka dan tidak ada pandangan dari para ulama yang melarang perempuan dalam berpolitik ataupun menjadi kepala negara. Fatwa yang muncul dalam masyarakat biasanya hanya pada masa Pemilu dan juga dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau politik uang.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT., yang telah melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam tidak lupa pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah atas izin Allah peneliti telah dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul *Perspektif Ulama Aceh Tentang Perempuan Dalam Politik*. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menjadi salah satu referensi pada penelitian selanjutnya atau pada perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah bagi peneliti sendiri.

Ucapan terimakasih peneliti yang tak terhitung kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Zubir Usman dan Ibunda Jamilah Salam yang telah membesarkan peneliti dengan penuh cinta, sayang, dan senantiasa menjadi motivasi peneliti dalam melanjutkan studi dan segala lika-liku kehidupan ini. Terimakasih juga kepada Abang M. Syakir dan juga Kakak Sasnita Ariana yang telah banyak memberikan pengalaman hidup yang berharga selama menjadi anak perantau di Banda Aceh. Ucapan terimakasih juga kepada adik-adik tercinta Ayu Nadila, Riska Eprilyana Zumilda, dan Fathir Saputra yang menjadi motivasi untuk terus bangkit dalam menyelesaikan program sarjana ini. Tidak lupa ucapan terimakasih juga kepada seluruh keluarga besar yang sudah mensupport peneliti dalam menjalani proses perkuliahan.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran Ibu Musdawati, S.Ag., M.A selaku dosen pembimbing I dan Ibu Raina Wildan, S.Fil.I., M.A selaku dosen pembimbing II, juga kepada Penasihat Akademik Bapak Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Hum yang

telah memberikan bimbingan, saran dan juga arahan selama proses penulisan skripsi ini. Ibu telah menjadi sumber inspirasi serta memberikan dukungan dan bantuan yang sangat berarti dalam menuntun langkah peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih atas kesabaran, dukungan dan dedikasi Ibu selama ini. Hormat dan penghargaan yang tinggi peneliti sampaikan kepada Ibu sekalian.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, terkhusus kepada seluruh dosen dan staf Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam atas bimbingan, saran, dukungan, ilmu yang sangat berharga dan juga kesempatan yang luarbiasa selama menempuh pendidikan akademik di Prodi tercinta. Terimakasih yang tak terhingga atas dukungan dan komitmen mereka dalam mendukung mahasiswa mencapai kesuksesan.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada perpustakaan kampus, fakultas, dan juga perpustakaan wilayah atas pelayanan dan fasilitas yang tersediakan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Kesediaan koleksi buku, kumpulan skripsi, jurnal dan sumber informasi lainnya sangat membantu dalam pengembangan penelitian ini.

Ucapan terimakasih juga peneliti ucapkan kepada seluruh responden peneliti, yaitu tokoh-tokoh hebat yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi responden peneliti. Atas segala bantuan dan partisipasinya semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga bermanfaat bagi para pembaca kelak.

Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besar UKM KTM ‘Rongsokan’ yang telah memberikan pegalaman, tempat tinggal sekaligus menjadi rumah untuk pulang di kala lelah. Komunitas yang telah menjadi keluarga kedua yang selalu mendukung, memotivasi, merangkul, dan menjadi panutan untuk terus tumbuh dan berkarya. Pengalaman dan ilmu yang luarbiasa yang telah kalian berikan akan selalu menjadi memori indah dalam setiap langkah penulis yang akan

mewarnai perjalanan ini. Terimakasih sudah mengiringi langkah peneliti dan banyak memberi warna baru selama menjadi mahasiswi di kampus biru. Terimakasih telah mengenalkan arti *“Dibuang Bukan Berarti Terbuang”* yang menyadarkan peneliti bahwa tidak berhasil di akademik bukan berarti gagal dalam meraih gelar sarjana.

Terimakasih peneliti ucapkan kepada R. Aulia Vischar, yang senantiasa ada dalam suka maupun duka. Terimakasih peneliti ucapkan kepada Bang Dendi, Bang Mus, Bang Imam, Rafi Zainal, Aditya Anshari, Haikal, Rifqah Basyirah, Putri Tasya Diana, Nurul Izzati, Rahimi nisa, Syifa Nabila, Tissa Asara, Indra zulfahmi, Bang RAP, Bang machfud Ridha, Kak Riska Yanti, Cut Saja Annisah dan juga kepada seluruh teman-teman yang telah banyak membantu, mendukung, memotivasi, selama proses penulisan.

Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman Prodi Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2018, teman-teman seperjuangan, seiring bahu dalam menyelesaikan pendidikan di kampus biru ini. Terimakasih juga kepada HMP AFI yang telah bersama-sama menorehkan sejarah keorganisasian di fakultas tercinta.

Pada akhirnya, peneliti tidak dapat membalas kebaikan orang-orang yang namanya telah disebutkan. Peneliti hanya bisa berdoa semoga Allah swt. membalas kebaikan mera dan melimpahkan rahmat, karunia, serta kasih sayang-Nya kepada mereka semua. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan saran dan juga masukan dari para pembaca sekalian.

Banda Aceh, 15 Maret 2025

Penulis,

Ismatul Rahmi

NIM. 180301008

## DAFTAR ISI

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                     | <b>i</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                | <b>ii</b>  |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>                | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                           | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                    | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                        | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                   | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                 | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                | 1          |
| B. Fokus Penelitian .....                      | 7          |
| C. Rumusan Masalah .....                       | 7          |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....         | 7          |
| <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>         | <b>9</b>   |
| A. Kajian Pustaka .....                        | 9          |
| B. Kerangka Teori .....                        | 12         |
| C. Definisi Operasional .....                  | 16         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>          | <b>18</b>  |
| A. Pendekatan Penelitian .....                 | 18         |
| B. Insforman Penelitian .....                  | 18         |
| C. Instrumen Penelitian .....                  | 18         |
| D. Sumber Data .....                           | 19         |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....               | 19         |
| F. Deskripsi Analisis .....                    | 20         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>           | <b>23</b>  |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....       | 23         |
| B. Partisipasi Politik Perempuan di Aceh ..... | 27         |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| C. Penyebab Rendahnya Partisipasi Perempuan<br>dalam Politik .....    | 34         |
| D. Pandangan Ulama Tentang Hak Politik<br>perempuan dalam Islam ..... | 38         |
| E. Analisa Penulis .....                                              | 53         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                            | <b>60</b>  |
| A. Kesimpulan .....                                                   | 60         |
| B. Saran .....                                                        | 61         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                           | <b>63</b>  |
| <b>LAMPIRAN.1 PEDOMAN PENELITIAN .....</b>                            | <b>i</b>   |
| <b>LAMPIRAN.2 SK SKRIPSI .....</b>                                    | <b>ii</b>  |
| <b>LAMPIRAN.3 SURAT PENELITIAN .....</b>                              | <b>iii</b> |
| <b>LAMPIRAN DOKUMENTASI.....</b>                                      | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                     | <b>vii</b> |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara  
Lampiran 2 : Surat Keputusan Pengangkatan Pembimbing SK  
Skripsi  
Lampiran 3 : Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas  
Ushuluddin dan Filsafat  
Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kaum perempuan adalah salah satu kekuatan masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi kemerdekaan bangsa untuk mewujudkan sistem kehidupan dalam masyarakat. Gerakan perempuan, yang juga dikenal sebagai gerakan gender atau gerakan politik, sebenarnya berawal dari suatu gerakan pada akhir abad ke-19 di negara-negara Barat, yang dikenal dengan sebutan gerakan "*suffrage*". Gerakan ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan perempuan serta meningkatkan status dan peran mereka. Esensi dari perjuangan perempuan adalah menyuarakan nasib golongan manusia yang selama ini kurang mendapat perhatian, yakni kaum perempuan.<sup>1</sup>

Isu yang akan mempengaruhi peran perempuan dalam dunia politik berkaitan dengan kepemimpinan dan partisipasinya dalam bidang tersebut. Kepemimpinan formal mencakup posisi-posisi seperti Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua Pansus, Ketua Delegasi, dan Ketua Badan, serta jabatan-jabatan lainnya. Secara bertahap, posisi-posisi kepemimpinan ini mulai diisi oleh perempuan. Sebagai contoh, Fraksi PDI kini sudah dipimpin oleh perempuan, dan di jajaran wakil ketua fraksi, Golkar sudah lama memiliki wakil ketua perempuan.<sup>2</sup>

Peran perempuan dalam politik mengalami kemajuan yang cukup pesat seiring berjalannya waktu. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota legislatif, khususnya sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009. Pada Pemilu 1999, keterwakilan perempuan mencapai 9%,

---

<sup>1</sup> Saparinah Sadli, *Pengantar Tentang Kajian Wanita* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 14.

<sup>2</sup> Saparinah Sadli, *Pengantar Tentang Kajian Wanita*, hlm. 62

pada Pemilu 2004 meningkat menjadi 11,8%, dan pada Pemilu 2009 naik lagi menjadi 18%.<sup>3</sup>

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 yang meratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan, yang mencakup berbagai aspek seperti penerapan kesetaraan kedudukan (non-diskriminasi), hak yang setara untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, peluang untuk menduduki posisi dalam birokrasi, serta hak untuk terlibat dalam organisasi sosial dan politik. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor mulai terasa setelah perubahan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada pasal 28 H ayat (2), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang setara demi mencapai persamaan dan keadilan".<sup>4</sup>

Kebijakan afirmasi bagi perempuan dalam politik mulai diberlakukan setelah perubahan UUD 1945, dimulai dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Di tingkat kelembagaan partai politik, kebijakan ini diwujudkan dengan kewajiban partai politik untuk mencantumkan minimal 30% keterwakilan perempuan, baik dalam struktur pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.<sup>5</sup>

Aturan ini tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mengharuskan "Kepengurusan partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), harus menyertakan keterwakilan perempuan sekurang-

---

<sup>3</sup> Ignatius Mulyono, "Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan" (makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Jakarta, 2 Februari 2010).

<sup>4</sup> Ignatius Mulyono, "Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan"

<sup>5</sup> Ignatius Mulyono, "Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan"

kurangnya 30%, yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik”.<sup>6</sup>

Masalah sosial yang dihadapi oleh kaum perempuan hingga saat ini masih menjadi topik yang relevan dan bahkan penuh tantangan. Pertarungan politik menjadi lebih menarik ketika muncul kandidat perempuan, sebuah fenomena yang dapat ditemukan di hampir seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang, serta di negara-negara Islam maupun non-Islam. Munculnya Megawati Soekarnoputri sebagai kandidat Presiden Republik Indonesia pada pemilu 1999 melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bahkan terpilih sebagai presiden menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid, mengundang polemik di kalangan masyarakat muslim. Sebagian ulama membolehkan kepemimpinannya, sementara yang lain menolaknya.

Aceh merupakan sebuah wilayah yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Sepanjang sejarahnya, Aceh pernah menjadi pusat berbagai kerajaan Islam, seperti Pasi, Pidie, Daya, Lamuri, dan Aceh Darussalam, yang masing-masing memiliki pengaruh besar dalam aspek sosial, politik, agama, dan ekonomi. Namun, yang membedakan Kesultanan Aceh Darussalam adalah pengakuan dan pemberian posisi setara kepada perempuan, yang diberi kedudukan sejajar dengan laki-laki.

Posisi perempuan di tahta tertinggi dalam sebuah kesultanan seringkali menjadi topik yang kontroversial. Untuk memahami fenomena sejarah ini, perlu dilihat kembali perkembangan sejarah umat Islam di masa lalu. Kesultanan Aceh Darussalam menjadikan Islam sebagai dasar negara dan Qanun Meukuta Alam sebagai sumber hukum utamanya. Berdasarkan

---

<sup>6</sup> Ignatius Mulyono, “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”

prinsip ini, kedudukan perempuan dipandang setara dengan laki-laki dalam aspek kehidupan sosial dan kenegaraan.<sup>7</sup>

Selama sejarahnya, Kesultanan Aceh Darussalam pernah dipimpin oleh empat perempuan berturut-turut dalam kurun waktu 60 tahun. Mereka adalah Sulthanah Tahul Alam Safiatuddin Syah (1641-1675), Sulthanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678), Sulthanah Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688), dan yang terakhir, Sulthanah Kamalatuddin Syah (1688-1699).<sup>8</sup>

Fenomena kepemimpinan perempuan di Aceh masih diperdebatkan keabsahannya sampai saat ini. Walaupun para ratu pernah berkuasa selama kurang lebih 60 tahun, mereka tentulah orang-orang yang sangat luar biasa. Apalagi ratu Safiatuddin yang pernah menjabat selama 35 tahun, tidak lepas dari kenyataan bahwa peran ulama sangat berperan penting dalam melegitimasi pemerintahan ratu, seperti Nurudin al-Raniri yang berperan besar dalam penobatan ratu pertama dan Abdurrauf al-Singkili yang melanggengkan pemerintahan ratu-ratu Aceh.

Selama masa pemerintahannya, Ratu Safiatuddin yang memperoleh dukungan penuh dari Nurudin al-Raniri, diangkat menjadi ratu dengan gelar *Sri Sultan Tahul Alam Safiatuddin Syah berdaulat Zil Allah Fil Alam Ibnat Sultan Iskandar Muda Johan Berdaulat*.<sup>9</sup>

Ada beberapa kemajuan yang dicapai pada masa Ratu Safiatuddin. *Pertama*, dalam bidang politik dan pemerintahan, Safiatuddin merumuskan kembali Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam yang disebut *Qanun* atau *Adat Meukuta Alam* sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan di Kerajaan Aceh-Kerajaan Islam Asia Tenggara. *Kedua*, dalam bidang

---

<sup>7</sup> Supriyono, "Konflik Tentang Kepemimpinan Perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam Tahun 1641-1699 M" (Skripsi Sejarah dan Kebudayaan Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), 1

<sup>8</sup> Marlinda Irwanti, "Komunikasi Politik Perempuan talaah atas kepemimpinan Ratu Safiatuddin di Aceh Darussalam abad ke-17" *Jurnal Vol. 28, No. 1*, (2011), hlm. 122

<sup>9</sup> Marlinda Irwanti, "Komunikasi Politik Perempuan talaah atas kepemimpinan Ratu Safiatuddin di Aceh Darussalam abad ke-17", hlm 125

ekonomi. Pemerintahan pada masa ratu sangat stabil karena Aceh dikenal sebagai jalur niaga dunia. *Ketiga*, dalam bidang sosial dan budaya ratu sangat dikenal sebagai orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat.

Konflik kepemimpinan perempuan di Aceh berakhir pada tahun 1699 M ketika Sultanah Kamalat Syah mengundurkan diri dari tahta kesultanan. Keputusan ini didorong oleh tekanan besar dari kelompok oposisi yang ingin menggulingkan pemerintahan ratu. Salah satu versi cerita mengungkapkan bahwa mufti kesultanan yang baru mendukung kelompok oposisi dan pergi ke Mekah untuk meminta fatwa dari Mufti Besar Mekah mengenai keabsahan perempuan sebagai kepala negara. Mufti Besar kemudian mengirimkan surat ke Aceh yang menyatakan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi sultanah.<sup>10</sup>

Bahkan setelah bertahun-tahun kemudian, posisi kepemimpinan perempuan di Aceh kembali diisi oleh tokoh perempuan yang mencalonkan diri menjadi Walikota Banda Aceh. Beliau adalah Illiza Sa'aduddin Djamal yang kemudian gagal dalam Pilkada pada tahun 2017 menyebabkan banyak masyarakat Aceh menyayangkan akan hal tersebut mengingat Illiza merupakan sosok yang dianggap mampu memimpin Ibukota Provinsi Aceh.

Kekecewaan ini timbul karena setelah konflik, Aceh mengalami krisis dalam hal regenerasi perempuan yang memiliki potensi kepemimpinan. Satu-satunya perempuan yang dianggap pantas dan layak hanya Illiza mengingat prestasi politiknya yang gemilang dan sudah berpengalaman dalam kancah perpolitikan Aceh. Ini bukan tanpa alasan, karena beliau pernah menjabat sebagai Walikota dan juga Wakil Walikota selama lebih dari satu periode. Di masa kepemimpinannya, Kota Banda Aceh meraih berbagai penghargaan, dan penerapan syariat Islam juga patut mendapatkan pujian.

---

<sup>10</sup> Supriyono, "Konflik Tentang Kepemimpinan Perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam Tahun 1641-1699 M", hlm 5

Musdawati menyimpulkan bahwa kegagalan pasangan calon perempuan dalam memenangkan kursi Walikota Banda Aceh pada Pilkada 2017 disebabkan oleh keraguan yang timbul di kalangan konstituen. Keraguan ini dipicu oleh pernyataan yang bertentangan dari dua ulama besar Aceh; satu pihak mengharamkan kepemimpinan perempuan, sementara pihak lainnya menyatakan bahwa tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang membatasi peran politik perempuan. Akibatnya, konstituen lebih memilih untuk menjaga posisi aman dengan menarik dukungannya dari calon pemimpin perempuan. Hasilnya, perempuan terancam kehilangan tempatnya dalam dunia politik.<sup>11</sup>

Fenomena ini menarik karena Aceh memiliki sebuah lembaga ulama yang dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). MPU merupakan lembaga independen yang tidak berada di bawah struktur Pemerintah Daerah maupun DPRD. Sebagai mitra sejajar dengan Pemerintah Daerah dan DPRD, MPU berfungsi untuk memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasihat, serta saran terkait kebijakan daerah dari perspektif Syariat Islam, baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.<sup>12</sup>

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh adalah lembaga yang memiliki kedudukan sejajar dengan badan eksekutif, legislatif, dan institusi lainnya. MPU terdiri dari ulama, cendekiawan, dan pemimpin Muslim di Aceh yang bekerja sama untuk merumuskan ide dan mengambil keputusan secara kolektif.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat banyak aspek yang perlu dipahami dan dianalisis guna memperluas wawasan terkait isu perempuan yang menjadi polemik besar dalam masyarakat. Pendapat dari para ulama berpengaruh besar dalam menentukan nasib perempuan di Aceh dalam menjawab persoalan politik perempuan karena pendapat dari ulama lah naik dan turunnya

---

<sup>11</sup> Lailatussaadah, "Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies" *Jurnal* Vol. 3, No. 2, (2017), hlm. 101

<sup>12</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh : Adnin Foundation Publisher & Pena Banda Aceh, 2009), hlm. 56

pemerintahan yang dipimpin oleh perempuan. Situasi ini mendorong peneliti untuk menggali lebih dalam melalui penelitian mengenai *“Perspektif Ulama Aceh Tentang Perempuan Dalam Politik”*.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti memfokuskan penelitian ini untuk menggali hak-hak politik perempuan dalam Islam serta pandangan para ulama mengenai peran perempuan dalam dunia politik. Hal ini difokuskan karena melihat beberapa hal yang menjadi persoalan yang dirasa mendalam untuk diteliti dan MPU Aceh mempunyai peran penting untuk menjawab persoalan terkait hal ini.

Fungsi sosial politik dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi dari baik laki-laki maupun perempuan.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi politik perempuan di Aceh?
2. Bagaimana pandangan Ulama Aceh tentang hak politik dan partisipasi perempuan di Aceh?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan apa saja hak politik perempuan dalam Islam menurut ulama Aceh.
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan Ulama terhadap partisipasi perempuan dalam politik.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan memperluas wawasan bagi pembaca, serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemahaman tentang perpolitikan bagi perempuan. Sehingga dapat dilihat secara sudut pandang para tokoh ulama terhadap perempuan yang berada dalam perpolitikan.

### b. Manfaat Praktis

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, serta memperkaya pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti. Bagi masyarakat, penelitian ini memiliki nilai penting sebagai sumber pemahaman mengenai perpolitikan perempuan.

